

PERAN HUMAS PEMERINTAH MEMBANGUN CITRA POSITIF: (ANALISIS KASUS GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024)

Rosmala ^{1,*}; Hefri Yodiansyah ²; Susi Artuti Erda Dewi ³; Debby Kurniadi ⁴; Ikhwan Theo ⁵

^{1,2,3,4} Universitas Persada Bunda Indonesia, Pekanbaru, Indonesia; rosmala.lbs@gmail.com

⁵ Universitas Teknologi Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia;

*Correspondence : rosmala.lbs@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran humas dalam membangun citra pemerintah. Humas Pemerintah merupakan peran yang menjadi representatif organisasi dan menjadi garda terdepan saat organisasi terkena suatu isu. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran humas pemerintah dan upaya membangun citra positif pada kasus Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan data primer dengan *library research*. Flow analysis model yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan dalam hasil penelitian: Peran humas Pemprov Kalimantan Selatan berhasil menciptakan *goodwill*; Humas pemerintah mampu menjaga hubungan baik dengan stakeholder; Peran humas membangun pemahaman masyarakat tentang kebijakan Pemerintah; Membangun kepercayaan (*trust*) masih perlu diperbaiki dari dalam secara internal dan juga memperbaiki dari luar eksternal.

Kata kunci

Citra Positif, Humas Pemerintah, Kalimantan Selatan, Peran

ABSTRACT

This research is motivated by the important role of public relations in building the government's image. Government Public Relations is a role that represents the organization and is at the forefront when the organization is hit by an issue. The aim of the research is to determine the role of government public relations and efforts to build a positive image in the case of the Governor of South Kalimantan in 2024. The method used in this research is descriptive qualitative. The data collection technique used was primary data with library research. Flow analysis model, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Findings in the research results: The role of public relations of the South Kalimantan Provincial Government was successful in creating goodwill; Government public relations is able to maintain good relations with stakeholders; The role of public relations is to build public understanding of Government policies; Building trust still needs to be improved internally and also externally.

Keywords

Government Public Relations, Positive Image, Role, South Kalimantan

Pendahuluan

Kronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan di Kalimantan Selatan diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, dari OTT tersebut, KPK menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor sebagai tersangka lantaran diduga menerima hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara (Sari & Prabowo, 2024). Kasus ini tentunya berdampak pada instansi Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan. Terkait pada kasus ini tentu peran humas pemerintah sangat dibutuhkan dalam memulihkan citra positif di lembaga instansi Pemprov Kalimantan Selatan. Humas merupakan salah satu divisi dalam pemerintahan yang mengemban tugas sebagai pelayanan publik dalam memberikan informasi kepada masyarakat, informasi yang diberikan tentunya berpengaruh terhadap citra pemerintah dimana humas itu berada (Rosmala, 2018). Namun bagi humas pemerintah, era ini adalah era pertarungan informasi yang sangat bebas. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan instansi yang dipimpin oleh Gubernur Penjabat Gubernur lainnya ke bawah secara hirarki. Dengan kesibukan dan jadwal kegiatan yang padat tentu dibutuhkan Humas yang mampu menjembatani informasi kegiatan pemerintah kepada masyarakat. Humas dituntut mampu menjelaskan, berkomunikasi dengan cepat, cekatan dan sanggup menyampaikan informasi kepada masyarakat untuk menimbulkan citra baik, saling pengertian dan menimbulkan persepsi yang sama antara pejabat pembuat kebijakan dengan masyarakat. Pada masa-masa sekarang banyak media memberitakan terkait kasus Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2024. Apalagi sampai Gubernur menghilang sejak kasus tersebar di penjuru bumi ini. Hal ini menjadi kesenjangan bagi humas pemerintah untuk dapat mengatasi permasalahan yang terjadi Pemprov Kalimantan Selatan akan menjadi sasaran kritik bahkan objek *hoax* dan kebijakan-kebijakan serta program-program yang dijalankan dikritisi dan disalahkan. Selain itu, tentu humas pemerintah mesti pandai-pandai memilih mana serangan informasi yang menyerang institusi pemerintah dan mana yang menyerang pribadi Gubernur dan pejabat Gubernur dalam menjalankan pemerintahannya. Kasus ini juga memiliki keterkaitan dengan beberapa fenomena yang terjadi Provinsi lain seperti berikut:

Tabel 1. Data Kasus OTT Gubernur Tahun 2022- 2024

No	Tahun	Provinsi	Nama Gubernur
1	2022	Papua	Lukas Enembe
2	2023	Maluku Utara	Abdul Gani Kasuba
3	2024	Bengkulu	Rohidin Mersyah

Sumber: Author, 2024

Berdasarkan tabel 1, menunjukkan bahwa data kasus fenomena kasus Gubernur tahun 2022-2024. Pertama, pada Tahun 2022 Gubernur Papua Lukas Enembe ditangkap oleh KPK di rumah makan Kota Jayapura pada 10 Januari 2023 (Shafarina, 2023). Kedua, fenomena yang terjadi Maluku Utara Tahun 2023 Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba terjaring OTT oleh KPK (Kamil & Krisiandi, 2023). Ketiga, Tahun 2024 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM) dan dua orang lainnya menjadi tersangka dilakukan KPK di lingkungan Provinsi Bengkulu (Nugroho, 2024).

Penelitian ini tentu menemukan *novelty* serta memiliki relevansi terhadap kajian atau riset terdahulu berikut adalah kajian yang memfokuskan pada peran humas

pemerintah: (Buluamang, 2023); (Crisbiantoro, 2024); (Nurhanifah et al., 2024); (Rosmala et al., 2024); (Ali & Leonardi, 2022). Sedangkan riset yang memfokuskan pada strategi humas pemerintah adalah (Satria & Widodo, 2017); (Ulumiyah & Gati, 2024); (Widodo et al., 2013). Sedangkan penelitian terkait pada program humas terhadap pembentukan citra pemerintahan yang baik di Provinsi Kalimantan selatan (Ayunii et al., 2023). Sehingga disinilah menjadi titik urgensi humas pemerintah berperan dalam membangun citra positif di Pemprov Kalimantan Selatan. Secara praktis penelitian ini berkontribusi dalam memberikan masukan kepada para praktisi Humas pemerintah dalam membangun citra positif terhadap masyarakat hal tersebut tidak lepas dari cara berkomunikasi atau penyampaian yang transparan pada masalah yang dihadapi Pemprov Kalimantan Selatan. Secara Akademik tentu hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah pandangan teoritis dalam suatu bidang studi mengenai peran public relations dalam membentuk citra positif pada Pemprov Kalimantan Selatan Berdasarkan data dan fenomena yang terjadi maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran humas pemerintah membangun citra positif pada kasus OTT Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2024. Maraknya kasus OTT di Indonesia khususnya di sektor Pemerintahan Provinsi, sehingga penulis hanya memfokuskan kajian penelitian pada peran humas pemerintah dan upaya humas membangun citra positif di Pemprov Kalimantan Selatan.

Menurut Yayuk Andriani, Kepala Bagian Humas dan Publikasi KPK bahwa menjadi perhatian bagi humas di daerah untuk mencegah dan memberantas tindak korupsi. Antara lain: Pertama, Akses Informasi dan Komunikasi, Humas memiliki peran yang sangat strategis sebagai pengelola informasi pemerintah daerah. Cakupan kerja humas pemerintah daerah sudah jelas, yaitu melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat terkait kebijakan pemerintah daerah. Kedua, Tingkatkan Relevansi, Persoalan tindak pidana korupsi yang ada di daerah bisa jadi lebih kompleks karena adanya keunikan budaya dan karakter masyarakat. Apabila humas pemerintah daerah gencar melakukannya, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi dari sumber yang dekat dengan mereka. Ketiga, Dorong Sinergi, Humas di daerah tidak hanya perlu menyampaikan pesan anti korupsi kepada masyarakat, namun juga ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Sebab pada akhirnya, tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi tanggung jawab seluruh OPD dan pimpinan daerah. Kampanye antikorupsi yang disampaikan oleh humas daerah juga harus terukur dan sinergis dengan pemerintah pusat (Humasindonesia.id, 2019).

Pada dasarnya *Public Relation* atau yang sering disebut dengan Humas merupakan profesi atau pekerjaan yang dibutuhkan oleh setiap jenis perusahaan, organisasi, bahkan pemerintahan. Sebagai saluran komunikasi baik internal maupun eksternal (Permini & Atmaja, 2022). Humas dalam menjalin hubungan fungsional dengan masyarakat adalah dengan melakukan kerjasama antara media daerah dalam menyebarkan informasi (transparan data dan pertanggung jawaban) ke masyarakat (Mas'ud & Haeril, 2022). Menurut Moore (2018) tugas inti humas adalah sebagai berikut: (1) Menganalisis opini publik dan memperoleh data tentang sikap publik untuk keuntungan manajemen; (2) Menginformasikan manajemen tentang tren politik, sosial, dan keuangan yang berlaku; (3) Membantu manajemen menyadari faktor-faktor operasional yang dapat merusak hubungan bisnis dengan publik; (4) Membimbing manajemen memahami ide-ide untuk menangani koneksi (Kaisar, 2024)

Secara garis besar fungsi *Public Relations* adalah: Pertama, Memelihara komunikasi yang harmonis antara perusahaan dengan publiknya (*maintain good communicaton*). Kedua, Melayani kepentingan publik dengan baik (*serve public's interest*). Ketiga, Memelihara perilaku dan moralitas perusahaan (Kriyantono, 2014). Peran *Public Relations* menurut Broom, Cutlip, dan Center, yaitu: (1) Penasihat Ahli, adalah pihak yang memiliki otoritas untuk menetapkan tindakan atau memberi nasihat tentang masalah; (2) Fasilitator komunikasi, bertindak sebagai pendengar yang hati-hati dan sebagai perantara atau mediator antara publik dan organisasinya; (3) Fasilitator Pemecah Masalah, bekerja sama dengan manajer lain untuk menemukan dan memecahkan masalah; (4) Teknisi komunikasi, adalah ketika seseorang masuk ke dunia *public relations*, mereka pertama kali akan bekerja sebagai teknisi komunikasi. Selain itu, deskripsi Teknisi komunikasi biasanya membutuhkan keahlian komunikasi dan jurnalistik. Mereka menulis dan mengedit newsletter karyawan, menulis rilis berita dan fitur, membuat konten untuk Web, dan mengelola kontak media (Trisnawati & Syarah, 2017)

Humas juga bertindak sebagai fasilitator dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah dengan stakeholder-nya serta dituntut menjadi ujung tombak dalam menumbuhkan citra positif dan menjaga nama baik instansinya (Maulida & Nugraha, 2024) *Government public relations (GPR)* atau kehumasan pemerintah mempunyai peran penting untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap tugas-tugas pembangunan dari pemerintah (Waluyo & Djaffar, 2020). Menurut Onong (2002) Humas Pemerintahan memiliki dua tugas yaitu : Pertama, menyebarkan informasi secara teratur mengenai kebijaksanaan, perencanaan dan hasil yang telah dicapai; Kedua, menerangkan dan mendidik publik mengenai perundang-undangan hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan rakyat sehari-hari. Selain itu adalah tugasnya pula menasehati pimpinan departemen dalam hubungannya dengan reaksi atau tanggapan publik terhadap kebijaksanaan yang dijalankan (Waluyo & Djaffar, 2020). Menurut Onong (2002) Humas Pemerintahan memiliki dua tugas yaitu : Pertama, menyebarkan informasi secara teratur mengenai kebijaksanaan, perencanaan dan hasil yang telah dicapai; Kedua, menerangkan dan mendidik publik mengenai perundang-undangan hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan rakyat sehari-hari. Selain itu adalah tugasnya pula menasehati pimpinan departemen dalam hubungannya dengan reaksi atau tanggapan publik terhadap kebijaksanaan yang dijalankan (Anggrahini et al., 2014)

Humas Pemerintah, juga dikenal sebagai *Government Public Relations (GPR)*, adalah salah satu pihak yang memainkan peran penting dalam mengatur informasi publik dan menerapkan keterbukaan informasi publik (Rosmala et al., 2024). Seorang Pranata Humas juga harus mempunyai empat fungsi jenis pelayanan dasar, yakni: (1) Fungsi nasehat, peran pranata humas memberikan konsultasi terhadap suatu masalah atau isu ke internal lembaga; (2) Fungsi pelayanan komunikasi, pranata humas menyampaikan informasi tentang kepentingan lembaga pemerintah kepada publik melalui berbagai jenis media; (3) Fungsi pengkajian, pranata humas berhak melakukan riset dan memantau opini publik tentang lembaganya dan bisa memengaruhi lembaga tersebut; (4) Fungsi promosi, pranata humas bisa mempromosikan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah (Mujiarto et al., 2024).

Humas Pemerintah berperan dalam hal sebagai berikut: (1) Menciptakan *goodwill*; (2) Menjaga hubungan baik dengan stakeholder; (3) Membangun pemahaman masyarakat tentang kebijakan Pemerintah; (4) Membangun kepercayaan (*trust*)

masyarakat terhadap sebuah pemerintahan (Sani et al., 2020). Peran Humas Pemerintah adalah sebagai komunikator yakni membuka akses dan saluran komunikasi dua arah, antara instansi pemerintah dan publiknya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sarana kehumasan, berperan sebagai fasilitator, diseminator, katalisator, konselor, dan *prescriber* (Jdih.menpan.go.id, 2011). Dalam teori *excellence* juga dikemukakan Kent & Taylor (2007) humas adalah: fungsi strategis manajemen (*involment*); bagian koalisi dominan dan langsung berkomunikasi dengan top management (*empowerment*); terintegrasi kedalam satu departemen sendiri (*integration*); fungsi manajemen yang terpisah dari fungsi manajemen yang lain (*independence*); harus melaksanakan fungsi manajer komunikasi bukan hanya teknisi komunikasi (*managerial*); bersifat simetris dua arah dalam menjalin relasi publik (*symmetrical model*); sistem komunikasi internal bersifat simetris dua arah (*symmetrical internal communication*); fungsi humas dilaksanakan dengan berdasarkan ilmu pengetahuan (*knowledge*); adanya diversitas peran dalam menjalankan fungsi (*role diversity*); dan humas harus mengutamakan kode etik dan integritas profesi (*ethical public relations*) (Kriyantono, 2014)

Merujuk Peraturan Menteri (Permen) Negara APendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) No 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa humas pemerintah adalah lembaga Humas dan/atau praktisi humas pemerintah yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi yang persuasif, efektif, dan efisien. Hal itu, untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publiknya melalui berbagai sarana kehumasan dalam rangka menciptakan citra dan reputasi yang positif instansi pemerin. Tata kelola kehumasan pemerintah sendiri diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)No. 30 tahun 201 1 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi pemerintah. Pedoman Umum ini mengatur peran Humas Pemerintah, yang meliputi unsur-unsur berikut: Pertama, Komunikator, Humas pemerintah berperan membuka akses dan saluran komunikasi dua arah, antara instansi pemerintah dan publiknya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sarana kehumasan. Kedua, Fasilitator. Humas Pemerintah berperan menyerap perkembangan situasi dan aspirasi publik untuk dijadikan masukan bagi pimpinan instansi pemerintah dalam pengambilan putusan. Ketiga, Diseminator. Humas Pemerintah berperan dalam pelayanan informasi terhadap internal organisasi dan publiknya, baik langsung maupun tidak langsung, mengenai kebijakan dan kegiatan masing-masing instansi pemerintah. Keempat, Katalisator. Humas Pemerintah berperan dalam melakukan berbagai pendekatan strategi guna mempengaruhi sikap dan pendapat publik untuk menyelaraskan kepentingan pemerintah dengan publik (Ramadani, 2021)

Citra yang baik merupakan kebutuhan sebuah instansi atau organisasi, maka inilah yang menjadi salah satu tugas yang dilakukan oleh humas sebagai suatu sistem melalui program-program *public relations* (Habib & Suratman, 2018). Soemirat dan Ardianto (2010) mengatakan bahwa citra adalah kesan, perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan. Kesan ini diciptakan secara sengaja dari suatu obyek, orang atau organisasi (Kholisoh & Yenita, 2015). Citra positif sangat penting dibangun oleh humas sehingga dapat melekat baik di mata masyarakat maupun di mata pemerintahan. Dalam upaya untuk membangun citra positif, komunikasi dan keterbukaan merupakan hal yang penting. Dalam membangun citra positif, humas dapat memanfaatkan bantuan

media(Purwo & Puspasari, 2020). Pencitraan seringkali dikaitkan dengan sesuatu yang negatif, padahal pencitraan adalah hal yang positif. Pencitraan atau branding, merupakan cara untuk dikenal masyarakat luas. Suatu perusahaan atau instansi tentu membutuhkan pencitraan ini agar dipercaya oleh masyarakat(Yati, 2021). Jenis citra terbagi dalam 3 yaitu: (1) Citra positif, dapat terbentuk apabila publik mendapatkan informasi yang baik mengenai suatu perusahaan; (2) Citra Negatif, dapat terbentuk apabila publik mendapatkan informasi yang buruk mengenai suatu perusahaan; (3) Ketika berkomunikasi dengan pihak eksternal (khalayak) *Public Relation* memiliki strategi khusus dalam mencapai pembentukan citra positif sebagai sasaran perusahaan (Santoso, 2019)

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Desain ini dipilih karena penelitian kualitatif mampu menyediakan data yang lengkap tentang suatu fenomena (Sugiyono, 2021). Metode kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi (Anggito & Setiawan, 2018). Flow analysis model digunakan sebagai teknik analisis data dalam penelitian ini, yakni terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: (1) Reduksi data; (2) Penyajian data; (3) Penarikan kesimpulan. Hal ini seperti yang dijelaskan (Miles et al., 2014). Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan (Sugiyono, 2019). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan penyelidikan investigasi sebuah fenomena dalam kehidupan nyata (Yin, 2017). Penelitian kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literature, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Adapun proses yang dilakukan peneliti dalam penelitian menggunakan penelitian pustaka ini, antara lain: (1) pemilihan topik, (2) eksplorasi informasi, (3) menentukan focus penelitian, (4) pengumpulan sumber data, (5) membaca sumber data, (6) membuat catatan penelitian, (7) mengolah catatan penelitian, (8) menuangkan penelitian menjadi sebuah artikel (Lani & Handayani, 2021). Adapun teknik mengumpulkan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian atau yang mengumpulkan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang saling terkait atau relevan (Rosmala & Thooyibah, 2023). Periode pengumpulan data dilakukan selama 3 Bulan (Oktober, November, Desember) tahun 2024 dokumen nasional seperti *e-jurnal*, situs berita *online* (Tempo.co; Kompas.com, Cnbcindonesia.Com; tribunnews.com, Antaranews.com; Kumparan.com; Poroskalimantan.com; diskominfomc.kalselprov.go.id).

Hasil dan Pembahasan

Peran Humas Pemerintah Membangun Citra Positif

Dalam mengelola pelepasan dan penyebaran informasi terhadap publik dalam mempertahankan citra yang baik, suatu instansi membutuhkan humas. Analisis peran humas pemerintah membangun citra positif terkait kasus Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2024 sebagai berikut:

Pertama, Menciptakan Goodwill. Membangun goodwill atau tujuan dan niat baik, lalu dijalankan secara konsisten diyakini akan memberikan dampak yang lebih besar untuk publik. Humas adalah fungsi manajemen yang bertujuan untuk *goodwill*, kepercayaan, saling pengertian, dan citra yang baik dari masyarakat. Humas juga berusaha untuk menciptakan opini publik yang menguntungkan semua pihak. Selain itu, humas juga berusaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis yang berasal dari pengertian bersama, saling pengertian, dan citra yang baik. Maka dalam Membangun persepsi, menentukan positioning, serta membuat brand yang berbeda dengan yang lain sudah menjadi tugas praktisi humas di organisasi. Menurut Agung Laksamana, *EVP Government Relations, External Affairs and Corporate Communications Freeport Indonesia*, dalam membangun brand organisasi, humas membutuhkan peta jalan (roadmap) yang jelas dan terarah (Humasindonesia.id, 2022). Pada kasus yang terjadi peran humas dalam pemerintahan Pemprov Kalimantan Selatan berperan membuat alur atau skema yang baik dalam menyampaikan informasi yang baik pada public Kunci tugas berat dalam pembentukan opini publik yaitu kejujuran dan kenetralan yang harus dipegang teguh oleh kalangan praktisi humas. Setiap pesan atau berita yang disampaikan kepada masyarakat melalui pers haruslah sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Kepentingan masyarakat harus senantiasa diutamakan. Jika hal ini benar - benar diperhatikan dan dilakukan Humas pemerintah, maka dengan sendirinya opini publik yang baik akan terbentuk dalam pencitraan institusinya. Peran humas Pemprov Kalimantan Selatan saat ini tidak lagi hanya menjadi jembatan komunikasi untuk menyampaikan informasi, melainkan juga menjadi unsur yang berkontribusi menyukseskan program organisasi. Pada lembaga pemerintah, humas harus bisa menciptakan reputasi pemerintahan yang baik (*good governance*) di pandangan masyarakat.

Gambar 1. Ketua DPRD Kalimantan Selatan



Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK. (ANTARA/Syamsuddin Hasan)

Banjarmasin (ANTARA) - Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK mengharapkan agar pemerintahan pada jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat tetap jalan sebagaimana biasa, kendati Gubernur Sahbirin Noor berstatus tersangka.

Sumber:Antaraneews.com

Berdasarkan data pada gambar 1, menunjukkan bahwa Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK menegaskan agar pemerintahan jajaran provinsi setempat harus tetap berjalan usai Gubernur Sahbirin Noor ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyuaipan.

“Kita tidak ingin karena Gubernur H Sahbirin Noor atau Paman Birin sebagai tersangka berimbas terhadap pemerintahan pada jajaran Pemprov Kalsel tidak jalan”(Supian HK, 2024)

Pemprov Kalimantan Selatan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan agar pelayanan terhadap masyarakat berlangsung normal. Supian menjelaskan pelayanan terhadap masyarakat sebagai salah satu upaya menunjang pembangunan dan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraan rakyat (Hasan, 2024). Kemudian hemat penulis, Humas hadir sebagai fasilitator komunikasi yang merupakan elemen penting yang dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap Pemerintah Pemprov Kalimantan Selatan pada masa sekarang. Kemudian, selaku humas pemerintah selalu terbuka dalam memberikan pelayanan yang maksimal untuk meningkatkan citra positif instansi dengan selalu menyebarkan informasi yang bersifat positif di seluruh media sosial” yang dimiliki seperti pada akun IG “kalselmc” dan *website* Pemprov Kalimantan Selatan (kalselprov.go.id). Melihat pentingnya peran Humas pada pemerintah, praktisi humas pemerintah harus menguasai peran Humas Pemerintah. (Astuty et al., 2017) menjelaskan hasil dari penelitiannya adalah jika SDM praktisi Humas minim latar belakang *public relation*, maka mungkin saja menjadi penyebab terdapat praktisi Humas yanghanya terbatas pada menjalankan peran sebagai fasilitator komunikasi dan teknis komunikasi.

Kedua, Menjaga Hubungan Baik dengan Stakeholder. Setiap kelompok yang berada di dalam ataupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan disebut dengan stakeholder. Stakeholder bisa pula kelompok penekan(*pressure group*) Kasali, 2005 dalam (Sani et al., 2020). Salah satu tugas humas dalam menjaga hubungan baik dengan para stakeholdersnya yaitu stakeholders eksternal pada komunitas masyarakat sekitar lingkungan perusahaan. Humas pemerintah ibarat pisau bermata dua yang harus menjaga citra lembaga tapi juga harus mempertahankan kebenaran yang objektif sesuai dengan kode etik. Tidak hanya menjadi komunikator, humas pemerintah juga harus bisa menjadi mediator yang menghubungkan agenda pemerintah dengan publiknya dan menampung aspirasi dari berbagai pihak. Peran humas sangat vital dalam menjaga dan mengelola hubungan dengan stakeholder atau pemangku kepentingan. Empat alasan mengapa humas perlu melakukan engagement dengan para stakeholder antara lain: (a) Membangun Kepercayaan dan Reputasi, humas perlu mendapatkan umpan balik dan melihat persepsi stakeholder. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan reputasi yang baik. Sebab, kepercayaan dan reputasi penting untuk keberhasilan jangka panjang organisasi atau perusahaan; (b) Memitigasi Risiko, Melakukan *engagement* kepada *stakeholder* dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko, baik berupa isu, konflik, maupun krisis; (c) Berinovasi dan Peningkatan, Dengan berkolaborasi bersama stakeholder, perusahaan dapat memperoleh gambaran dan perspektif baru untuk inovasi dan peningkatan kapasitas serta kualitas perusahaan; (d) Mematuhi Peraturan, Banyak yuridis yang mengharuskan perusahaan untuk terlibat dengan para stakeholder sebagai bagian dari kewajiban peraturan. Berikut merupakan salah satu kegiatan

menjaga hubungan baik dengan *stakeholder*. Membangun persepsi, menentukan *positioning*, serta membuat brand yang berbeda dengan yang lain sudah menjadi tugas praktisi humas di organisasi. Menurut Agung Laksamana, EVP *Government Relations, External Affairs and Corporate Communications Freeport Indonesia*, dalam membangun brand organisasi, humas membutuhkan peta jalan (*roadmap*) yang jelas dan terarah (HumasIndonesia.id, 2022)

Gambar 2. Rapat Paripurna Provinsi Kalimantan Selatan



BERITA DEWAN BERITA UMUM PIMPINAN DEWAN SIDANG PARIPURNA

Paripurna DPRD Provinsi Kalsel: Bahas Tindak Lanjut Surat Pengunduran Diri Gubernur Kalsel

Sumber: Humas DPRD Kalimantan Selatan

Berdasarkan data gambar 2, adalah bagian dari kegiatan humas DPRD Kalimantan Selatan dalam menjaga hubungan baik dengan *stakeholder* dimana angka menindak lanjuti Surat Pengunduran Diri Gubernur Kalsel Tanggal 12 November 2024 yang ditandatangani oleh H. Sahbirin Noor. Lebih lanjut, berpedoman Pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 78 Ayat 1 huruf b ditegaskan bahwa Kepala Daerah Berhenti Karena Permintaan Sendir (Humas DPRD Kalsel, 2024). Dalam *Practice of Government Public Relations* dijelaskan bahwa memberikan pelayanan publik merupakan hal yang paling penting dan diperlukan oleh humas pemerintah, dan tujuan dalam menyampaikan informasi publik tersebut adalah untuk memajukan kinerja pemerintahan itu sendiri (Lee et al., 2012). Selain itu, jika dianalisis pada pengunduran Gubernur Kalimantan Selatan merupakan bagian dari menjaga hubungan baik dengan *stakeholder*.

Gambar 3. Gubernur Kalimantan Selatan



Sumber: Diskominfo.mc.kalselprov.go.id, 2024

Berdasarkan Gambar 3, menunjukkan bahwa, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyampaikan pengunduran diri sebagai Gubernur Kalimantan Selatan di sisa jabatan periode kedua tahun 2021-2024 dan pamitan. Pengunduran diri disampaikan saat berpamitan bersama pegawai di lingkup Pemprov Kalsel di gedung Idham Chalid Kota Banjarbaru (Diskominfomc.kalselprov.go.id, 2024). Penulis menyimpulkan, dengan pengunduran diri yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan setidaknya dapat memulihkan citra yang positif karena hal tersebut dinilai merupakan salah satu tindakan yang dapat menciptakan suana yang kondusif di Pemprov Kalimantan Selatan dalam menjalankan roda pemerintahan. Citra Gubernur Kalimantan Selatan melalui humas pemerintahan menjadi bagian wujud performa yang ditonjolkan untuk memberikan sebuah sentuhan kepada publik. Humas dalam meningkatkan performa untuk memberikan kesan positif pemerintah dengan melakukan peningkatan citra atau pembentukan citra (Waluyo & Djaffar, 2020). Sejalan dengan hasil penelitian Siswanto dan Abraham bahwa dalam memberikan pelayanan publik merupakan hal yang paling penting dan diperlukan oleh humas pemerintah, tidak hanya sekedar mengatur strategi komunikasi yang efektif demi mewujudkan misi dari pemerintahan semata. Informasi publik merupakan salah satu aspek kunci untuk akuntabilitas pemerintah, praktisi humas pemerintah perlu membangun komunikasi eksternal dalam menyampaikan informasi (Siswanto & Abraham, 2016). Aspek yang penting diperhatikan dalam melakukan fungsi humas pemerintah menjaga hubungan dengan stakeholder atau sebagai jembatan publik dan lembaga adalah dengan melakukan komunikasi dua arah. *Two Way Communication* atau komunikasi dua arah itudalah model komunikasi yang seharusnya diterapkan oleh pejabat humas pemerintah.

Ketiga, Membangun Pemahaman Masyarakat Tentang Kebijakan Pemerintah. Humas dalam pemerintahan harus dimanfaatkan dan dikembangkan secara profesional karena pemerintah mempunyai tugas yang sulit: memutuskan program-program yang berorientasi pada masyarakat, dan di saat bersamaan, berhadapan dengan masyarakat dengan kepentingan yang kompleks yang terkait erat oleh karakteristik masing-masing program atau tindakan administratif (Kusumastuti, 2002). Menilik apa yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Sekda Kalsel) Roy Rizali Anwar bahwa untuk sementara Pemprov Kalsel hentikan sementara proyek tersangkut OTT KPK, Pertama Proyek yang menjadi objek perkara meliputi pembangunan lapangan sepak bola di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Kedua, Pembangunan Gedung Samsat Terpadu. Ketiga pembangunan kolam renang di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dilakukan agar pemehaan masyarakat tentang kebijakan pemrov kalsel tidak keliru dalam menilai setiap kebijakan Pemerintah kalsel. Selanjutnya dalam penuturan Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Kalsel, Ir. Roy Rizali Anwar, S.T. M.T

"Program-program strategis khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, mau pun pemberdayaan ekonomi, akan terus menjadi prioritas demi terwujudnya Kalsel yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing"(Roy Rizali Anwar,2024)

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh bapak Roy Rizali tidak ada kendala dalam melanjutkan program pemerintah di Pemprov Kalimantan Selatan tengah momen transisi yang terjadi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk tetap berjalan dan melanjutkan program-program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya (Humas DPRD Kalsel, 2024). Penelitian lain menyebutkan

bahwa untuk menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat berfungsi guna memperoleh pengertian, kepercayaan, dan dukungan dari masyarakat melalui penyelenggaraan di bidang informasi publik. Untuk mendapatkan informasi publik yang valid, Bagian Humas harus dapat berkolaborasi dengan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dalam mendiseminasikan dan pelayanan informasi yang dapat “menenangkan” pemerintah dalam membangun program-program kebijakannya (A. R. Nugraha et al., 2022). Selain itu juga, dalam upayanya memberikan peluang agar masyarakat mengetahui kegiatan pemerintah, melalui Biro Humas memasukkan dengan sengaja berita pemerintahan dalam media massa yang telah dipilih. Pemberitaan Pemerintah yang dimasukkan oleh Biro Humas yakni berupa Laporan Khusus, Rubrik Khusus atau Advetorial (Siswanto & Abraham, 2016). Dalam konteks penelitian sebelumnya Syarif Budhirianto dan Risa Sunarsi, menemukan bahwa Biro Humas Pemprov Jabar sebagian besar telah melaksanakan tata kelola informasi publik dengan standar pelayanan yang baik, namun diperlukan perubahan paradigma baru sesuai tuntutan informasi yang lebih transparan dan aktual, yaitu memberikan penguatan fungsi perbaikan pelayanan publik yang lebih terarah dan komprehensif, serta membangun citra dan reputasi lembaga kehumasan (Budhirianto & Sunarsi, 2017)

Hasil analisa ini dapat penulis deskripsikan bahwa humas harus berperan sebagai jendela informasi pemerintah dalam membangun tata alir informasi sehingga masyarakat bisa lebih memahami menjadi bagian dalam kehumasan di pemerintah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa humas pemerintah sebagai sarana informasi juga sebagai *supporting* untuk membantu keberhasilan dalam melaksanakan program-program pemerintah, oleh karena itu harus memiliki kemampuan membangun hubungan yang positif, konsep kerja yang terencana baik dan hingga mampu menciptakan citra baik bagi lembaga yang diwakilinya, serta membangun opini publik yang positif. Sejalan dengan pernyataan diatas, Keberadaan humas pemerintah di suatu lembaga atau instansi pemerintah merupakan keharusan, baik secara fungsional maupun operasional yang mampu bertindak sebagai *public information, public affair dan public communication* dalam upaya penyebaran atau mempublikasikan tentang kegiatan dan program kerja pembangunan pada instansi baik ditujukan kepada publik internal maupun publik eksternal (masyarakat) pada umumnya (Prastowo, 2020)

Keempat, Membangun Kepercayaan (Trust) Masyarakat Terhadap Sebuah Pemerintahan. Akibat kasus dari kasus Gubernur Kalimantan Selatan berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Masyarakat sangat menyayangkan atas kejadian yang terjadi di Pemprov Kalimantan Selatan. Pemerintahan yang bersih selalu terbuka pada informasi yang dibutuhkan masyarakat. Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Kalimantan Selatan Muhammad Muslim mengatakan Sahbirin Noor mundur dari Gubernur Kalimantan Selatan karena ingin menjaga kondusifitas dan kebaikan bersama (Tempo.co, 2024). Data lain juga menyebutkan bahwa berdasarkan hasil SPI 2022 dan 2023 Pemprov Kalsel, mengalami penurunan. Dimana pada SPI 2022 mendapat nilai 73.76 atau masuk kategori waspada, sedangkan pada SPI 2023, Pemprov Kalimantan Selatan mendapat nilai 72.54, yang masuk dalam kategori rentan. Namun, pada MCP 2023, skor yang diraih mengalami penurunan menjadi 85, dengan rincian fokus area perencanaan dan Penganggaran APBD (83), pengadaan barang dan jasa (95), perizinan (100), pengawasan APIP (70), manajemen ASN (90), optimalisasi pajak daerah (78), dan Pengelolaan BMD (78). Adapun SPI merupakan penilaian integritas yang dilakukan KPK pada suatu lembaga

pemerintahan untuk membantu perbaikan pelayanan. Sementara *Monitor Center for Prevention* (MCP) adalah pemetaan titik rawan korupsi di tingkat pusat dan daerah (Sari & Ramadhan, 2024).

Berdasarkan hasil di atas penulis menguraikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Pemrov Kalsel menurun dan perlu di tingkatkan melalui peran humas dalam pemerintahan dengan membangun kembali citra positif dikalangan masyarakat. Sampai saat ini Pemrov Kalimantan Selatan tetap berjalan dengan baik meskipun sedang mengalami kasus yang merusak citra positif lembaga instansi pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Rini (2017) yang menyatakan bahwa untuk menciptakan citra yang positif maka petugas PR harus memperbaiki dari dalam secara internal dan juga memperbaiki dari luar eksternal (Rini et al., 2017). Humas dalam instansi Pemerintah adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjembatani antara kepentingan Pemerintah dengan kepentingan masyarakat (Hikmah et al., 2023). Berikut kegiatan apel pagi di kantor Pemprov Kalimantan. Sahbirin Noor muncul setelah disebut hilang oleh KPK.

Gambar 4. Apel Pagi di Pemprov Kalimantan Selatan



Sumber. Biro Adpim, Pemprov Kalimantan Selatan, 2024

Berdasarkan data pada gambar 3, menunjukkan bahwa Gubernur Kalimantan Selatan masih hadir saat apel pagi dalam kegiatan ini tentu menjadi satu kegiatan yg dapat membangun kepercayaan *trust* masyarakat. Kehadiran Gubernur disambut dengan sukacita oleh ASN dan karyawan atau karyawan/wati lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan (Yasinta, 2024).

"Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul, berkajutan, Alhamdulillah dalam keadaan sehat wal alfiat, Pasti banyak hal barangkali, saya banyak berbuat kesalahan, membuat bapak ibu kurang nyaman selama saya menjadi Gubernur. Maka di momen berharga ini, saya mengucapkan mohon maaf dan ampun kepada seluruh keluarga besar ASN di Pemrov Kalsel" (Sahbirin Noor, 2024)

Menilik pernyataan Gubernur Kalimantan Selatan dalam mengucapkan mohon maaf dan ampun kepada seluruh keluarga besar ASN di Pemprov Kalimantan Selatan. Artinya Sistem pemerintahan masih berjalan dengan baik meskipun sedang diterpa kasus terkait OTT Gubernur Kalimantan Selatan (Ridwan & Thohir, 2024). Perangkat kehumasan harus terus memberikan informasi positif agar mampu memberi gambaran di benak orang lain tentang pemerintahan. Kehumasan baik di Pemprov maupun Kabupaten/Kota memiliki strategi maupun pedoman komunikasi yang disepakati untuk mengatasi jika sewaktu-waktu ada krisis (Ramdhani, 2024).

Upaya Membangun Citra Positif di Pemprov Kalimantan Selatan

Dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, beberapa hal yang dilakukan humas dalam pemerintahan membangun citra positif provinsi Kalimantan Selatan yaitu: *Pertama*, Kepercayaan (*trust*), merupakan syarat mutlak dalam pemerintahan yang baik. dengan adanya humas dalam Pemerintahan dapat mempertimbangkan isu-isu ke depan dalam mengembangkan kebijakan terkait daya saing, seperti isu yang terjadi saat ini pada kasus OTT Gubernur Kalimantan Selatan. Keterpaduan, keserasian, dan keselarasan antara informasi kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat seharusnya dapat diwujudkan. Terkait kasus diatas mulai memunculkan reaksi masyarakat di daerah. salah satu Pegiat/aktivis lingkungan Kabupaten Tanahlaut (Tala) yaitu Yamadipati yang juga *Head Project Operation* Nayaka Cyber Indonesia menggulirkan petisi: Ganti Nama Gedung dan Jalan yang Menggunakan Nama Gubernur Sahbirin Noor (N & Widodo, 2024). Alasannya, Menurut Yama bahwa Penggantian nama itu penting buat menjaga integritas dan citra daerah setelah Sahbirin Noor ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK (Rahmat, 2024) cara ini diyakini dapat mengembalikan citra positif. Selain itu, penetapan Sahbirin Noor sebagai status tersangka telah dibatalkan, kini menjadi warga negara yang bebas (R. F. Nugraha & Felisiani, 2024). Dari sini dapat disimpulkan bahwa dengan batalnya Gubernur kalsel sebagai tersangka dapat mengembalikan trus dan memberikan kesan positif masyarakat pada sistem pemerintahan Kalimantan Selatan.

Kedua, Transparansi. Menyampaikan informasi yang terbuka dalam artian masyarakat bisa dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan progres yang ada di pemerintah. Selain untuk membangun kepercayaan, transparansi juga diperlukan untuk memperkuat hubungan antara organisasi dan publik, dalam rangka meningkatkan reputasi. Transparansi yang dilakukan dengan kerjasama terhadap media, DPRD, KPK, dan pada masyarakat. Memberikan informasi bahwa proses kasus sedang berjalan dengan baik pada publik. Transparansi mengenai informasi dapat meningkatkan komunikasi masyarakat dengan pemerintah dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat terlibat secara langsung dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas di pemerintahan. Pada tahap ini, humas secara transparan melalui permintaan maaf pada publik.

Ketiga, Partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan baik secara langsung ataupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan masyarakat juga merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. *Keempat*, Responsif, yaitu humas pemerintahan harus cepat tanggap terhadap persoalan yang ada di masyarakat agar dapat terbentuk opini bahwa pemerintah membangun kepercayaan. Seperti yang telah dijelaskan, kemampuan perusahaan untuk menjaga reputasi positif sangat penting untuk keberlanjutan kesuksesannya. Peran utama PR adalah membantu membangun dan mempertahankan citra merek yang positif. Reputasi adalah hal yang perlu dipelihara oleh perusahaan, dan proses ini tentu memerlukan waktu yang tidak sedikit (Suryanti & Aranda, 2024). Peran humas pemerintah secara garis besar memiliki peran ganda yaitu, memberikan pesan atau informasi dengan kebijakan dan tujuan dari lembaga terkait untuk kepentingan publik sebagai khalayak dan juga sasaran dengan fungsi untuk menyerap aspirasi atau keinginan masyarakat. Keberadaan humas pemerintah merupakan keharusan fungsional serta operasional dalam upaya mempublikasikan

dan menginformasikan suatu kegiatan instansi untuk kepentingan masyarakat (Crisbiantoro, 2024).

Peran humas dalam kegiatan membangun citra positif, dapat memanfaatkan bantuan media. Bentuk pemanfaatan media untuk menyalurkan arus informasi dapat dilakukan melalui beberapa jenis media yaitu media cetak contohnya koran dan majalah, media elektronik contohnya radio dan televisi dan media baru, website, sosial media dan sebagainya. Selain itu humas pemerintah Pemrov Kalimantan Selatan menjadi fasilitator, dalam ilmu kehumasan untuk dapat menghasilkan citra positif itu tidak terjadi begitu saja, banyak proses dilalui yang dilakukan sehingga citra positif dapat terbentuk. Untuk menarik simpati dari pada pemangku kepentingan salah satunya dengancara membina hubungan baik pada orang ataupun masyarakat tersebut dengan cara menghadiri setiap even serta acara yang diadakan oleh masyarakat. Humas Pemrov menjalin kerjasama dan hubungan baik dari aspek sosial melakukan komunikasi dua arah. Humas Pemrov Kalimantan Selatan melakukan evaluasi pada tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan masalah serta memberikan informasi yang positif di berita-berita dan umpan balik yang terdapat pada media massa. Mengklarifikasi, serta menganalisis data dan informasi, mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah, dan membangun kepercayaan publik.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa analisis peran humas pemerintah membangun citra positif terkait kasus Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2024 antara lain: (1) Peran humas Pemrov Kalimantan Selatan berhasil menciptakn *goodwill*, melalui kerjasama dengan seluruh *stakeholder* di Pemrov kalsel, DPRD Kalsel, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi Kalsel, Kabid Cipta Karya dan KPK. Melaksanakan acara *conference pers* dengan media, wartawan dalam peliputan kasus yang terjadi di Pemrov Kalimantan Selatan; (2) Humas pemerintah Pemprov Kalimantan Selatan dengan DPRD Kalsel dalam menjaga hubungan baik dengan *stakeholder*, dibuktikan dengan pengunduran Gubernur Kalimantan Selatan pada jabatannya sehingga pemerintahan tetap berjalan dengan kondusif; (3) Peran humas membangun pemahaman masyarakat tentang kebijakan Pemerintah dengan tetap melanjutkan Program-program strategis khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, mau pun pemberdayaan ekonomi; (4) Peran humas dalam membangun kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap sebuah pemerintahan menemukan trus masyarakat berkurang pada Pemrov Kalimantan Selatan. Temuan pada petisi dari masyarakat untuk ganti nama Gedung dan Jalan yang menggunakan nama Gubernur Sahbirin Noor. *Trust* publik hilang sekejap mata. Pemrov mengambil tindakan untuk tetap menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Humas Pemrov Kalimantan Selatan dalam hal ini melibatkan pemangku kepentingan untuk tetap terlibat dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik. peran bumas dalam membangun kepercayaan (*trust*) masih perlu diperbaiki dari dalam secara internal dan juga memperbaiki dari luar eksternal, secara keseluruhan penelitian disimpulkan bahwa humas pemerintah sudah melakukan perannya dalam membangun citra positif pada kasus gubernur tahun 2024. Upaya membangun citra positif sudah dilakukan dengan baik namun masih perlu di tingkatkan lagi. Sebagai pintu informasi, humas berfungsi sebagai tempat keluar dan masuknya berbagai informasi dari dan untuk masyarakat. Berbagai kebijakan dari pemerintah disosialisasikan melalui humas.

Peneliti memberikan saran untuk meningkatkan kepercayaan publik sebaiknya humas pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan secara tepat sasaran mampu menghimpun *awareness* dari *public* dan menumbuhkan citra positif dari publik terhadap Pemprov Kalimantan Selatan. Citra yang baik akan menumbuhkan reputasi yang baik pula di Pemprov Kalimantan Selatan. Sebagai praktisi humas pemerintah di Pemprov Kalimantan Selatan perlu mengembangkan peran dalam menyerap perkembangan situasi dan aspirasi publik untuk dijadikan masukan bagi pimpinan instansi pemerintah dalam pengambilan putusan. Hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan fokus kajian riset pada indikator atau variabel lainnya seperti analisis pada strategi humas pada manajemen reputasi di Pemprov Kalimantan Selatan, bahkan pada kajian krisis *public relation* pada pemerintahan Gubernur Kalimantan Selatan.

Referensi

- Ali, S., & Leonardi, A. (2022). Peran Humas Pemerintah Desa Lambangsari Dalam Menanamkan Niat Baik (Goodwill) Tentang Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Di Masa Pandemi. *Global Komunka: Jurnal Ilmu Sosial Dan ...*, 5(1), 41–48. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.33822/gk.v5i1.4178>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (E. D. Lestari (ed.)). CV Jejak.
- Angrahini, M. D., Rochayanti, C., & Sosiawan, E. A. (2014). Peran Humas Pemerintah Kabupaten Sragen Dalam Pengelolaan Isi Informasi Website PEMDA Sebagai Media Communications Relations Dengan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Komunikasi (JIK)*, 6(2), 145–152. <https://doi.org/https://doi.org/10.31315/jik.v6i2.53>
- Astuty, S., Setyastuti, Y., Maulina, N., & Hanief, L. (2017). Analisis Fungsi dan Peran Humas Dalam Upaya Implementasi Good Governance (Studi pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin). *Journal Of Communication Studies*, 2(1), 1–19.
- Ayunii, R. D., Atika, A. N., Aprilianty, R., & Humaidi, M. A. (2023). Program Humas Terhadap Pembentukan Citra Pemerintahan Yang Baik Di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Mutakallimin : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1). <https://doi.org/10.31602/jm.v6i1.11280>
- Budhirianto, S., & Sunarsi, R. (2017). Revitalisasi Fungsi Humas Pemerintah Dalam Tata Kelola Informasi Di Biro Humas Pemprov Jabar. *Jurnal Komunka : Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 6(2). <https://doi.org/10.31504/komunka.v6i2.1122>
- Buluamang, Y. M. O. (2023). Pemulihan Citra Pemerintah dalam Insiden Besipae: Menakar Kualitas Peran Government Public Relations. *Jurnal Media Dan Komunikasi*, 3(2), 107–119. <https://doi.org/10.20473/medkom.v3i2.44046>
- Crisbiantoro, J. (2024). Peran Humas Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Aktivitas Media Relations (Studi pada Kantor Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Konawe). *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(4), 5399–5406.
- Diskominfo.mc.kalselprov.go.id. (2024). *Sahbirin Noor Mengundurkan Diri sebagai Gubernur Kalsel*. Diskominfo.mc.Kalselprov.Go.Id. <https://diskominfo.mc.kalselprov.go.id/2024/11/13/sahbirin-noor-mengundurkan-diri-sebagai-gubernur-kalsel/>
- Habib, D. R. Al, & Suratman, B. (2018). Peran Humas Dalam Meningkatkan Citra Positif Pada Lembaga Pemerintahan DPRD Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 06(02), 125–131. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/JPAPUNESA/article/view/32139>
- Hasan, S. (2024). *Ketua DPRD: Pemerintahan harus berjalan usai Gubernur jadi tersangka*. Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/4385606/ketua-dprd-pemerintahan-harus-berjalan-usai-gubernur-jadi-tersangka>

- Hikmah, B., Zebua, W. D. A., & Utari, S. A. (2023). Peran Humas Kepolisian Resor Tangerang Selatan dalam Meningkatkan Citra Kepolisian. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 221–238. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v1i4.572>
- Humas DPRD Kalsel. (2024). *Paripurna DPRD Provinsi Kalsel: Bahas Tindak Lanjut Surat Pengunduran Diri Gubernur Kalsel*. Dprdkalselprov.Id. <https://dprdkalselprov.id/paripurna-dprd-provinsi-kalsel-bahas-tindak-lanjut-surat-pengunduran-diri-gubernur-kalsel/>
- Humasindonesia.id. (2019). *Humas Melawan Korupsi*. Humas Indonesia. <https://www.humasindonesia.id/ppid/berita/humas-melawan-korupsi-216>
- Humasindonesia.id. (2022). *Ketahui Tips Membangun Brand Organisasi*. Humas Indonesia. <https://www.humasindonesia.id/berita/ketahui-tips-membangun-brand-organisasi-751>
- Jdih.menpan.go.id. (2011). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah*. Peraturan.Bpk.Go.Id. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/132871/permen->
- Kaisar, A. S. (2024). *Strategi Komunikasi Humas Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Kamil, I., & Krisiandi. (2023). *Jadi Tersangka Korupsi, Gubernur Maluku Utara: Saya Minta Maaf kepada Masyarakat*. Nasional.Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/20/15112941/jadi-tersangka-korupsi-gubernur-maluku-utara-saya-minta-maaf-kepada>
- Kholisoh, N., & Yenita. (2015). Strategi Komunikasi Public Relations dan Citra Positif Organisasi (Kasus Public Relations Rumah Sakit “X” di Jakarta). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(3), 195–209. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v8i3.2138>
- Kriyantono, R. (2014). *Teori Public Relations Perspektif Barat Dan Lokal: Aplikasi Penelitiandan Praktik*. Kencana.
- Kusumastuti, F. (2002). *Dasar Dasar Humas*. PT. Ghalia Indonesia.
- Lani, O. P., & Handayani, B. (2021). Peranan Humas Pemerintahan (Government Public Relations) dalam Menciptakan Reputasi Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Lontar*, 9(2).
- Lee, M., Neeley, G., & Stewart, K. (2012). *The Practice of Government Public Relations*. CRC Press.
- Mas’ud, & Haeril. (2022). Peran Humas DPRD Sebagai Suatu Sistem dan Fasilitator Publik (Studi pada DPRD Kabupaten Bima). *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 27–32. <https://doi.org/10.35326/jsip.v3i1.1904>
- Maulida, R. W., & Nugraha, A. R. (2024). Strategi Humas Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Mensosialisasikan Layanan Digital” Wa Kepo”. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu ...*, 1(July), 141–153. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.12208110>
- Miles, M. B., Huberman, A. Mi., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Mujiarto, C. A., Surya, I., & Ayu, D. I. (2024). *Mengenal Government Public Relations: Peran Strategis di Lembaga Pemerintah*. Iprahumas.Id.
- N, B. R., & Widodo, H. (2024). *Aktivis Tala Gaungkan Petisi Ganti Nama Sahbirin Noor pada Gedung dan Jalan di Kalsel, Ini Alasannya*. Banjarmasin.Tribunnews.Com. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/10/11/aktivis-tala-gaungkan-petisi-ganti-nama-sahbirin-noor-pada-gedung-dan-jalan-di-kalsel-ini-alasannya>
- Nugraha, A. R., Sjoraida, D. F., & Novianti, E. (2022). Analisis strategi humas pemerintahan era milenial dalam menghadapi tata kelola informasi publik. *PROfesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 6(2), 286. <https://doi.org/10.24198/prh.v6i2.37095>
- Nugraha, R. F., & Felisiani, T. (2024). *Status Tersangka Dibatalkan, Pengacara: Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Kini Warga Negara yang Bebas* Artikel ini telah tayang di *Tribunnews.com* dengan judul *Status Tersangka Dibatalkan, Pengacara: Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Kini Warga Negara yang Bebas*. Tribunnews.Com.

- <https://www.tribunnews.com/nasional/2024/11/13/status-tersangka-dibatalkan-pengacara-gubernur-kalsel-sahbirin-noor-kini-warga-negara-yang-bebas>
- Nugroho, R. A. (2024). *Kronologi OTT Gubernur Bengkulu, Peras Anak Buah Buat Ongkos Pilkada*. Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241125074100-4-590749/kronologi-ott-gubernur-bengkulu-peras-anak-buah-buat-ongkos-pilkada>
- Nurhanifah, Hidayat, T. A., Rambe, S., Hasibuan, S. F., & Bali, Y. (2024). Peran Humas Dalam Meningkatkan Citra Positif Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)*, 4(4), 458–467. <https://doi.org/10.26740/jpap.v8n3.p458-467>
- Permini, N. L. P. E., & Atmaja, I. M. W. K. (2022). Peran Humas Dalam Kegiatan Publikasi Online Pemerintah Di Kabupaten Badung. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 620–632. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i3.2773>
- Prastowo, F. A. A. (2020). Pelaksanaan fungsi pokok humas pemerintah pada lembaga pemerintah. *PROfesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 5(1), 17. <https://doi.org/10.24198/prh.v5i1.23721>
- Purwo, R. H. S., & Puspasari, D. (2020). Peran Humas Dalam Meningkatkan Citra Positif Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)*, 8(3), 458–467. <https://doi.org/10.26740/jpap.v8n3.p458-467>
- Rahmat, B. (2024). *Buntut OTT di Kalsel, Mencuat Petisi Ganti Nama Jalan dan Gedung Bernama Paman Birin*. Poroskalimantan.Com. <https://poroskalimantan.com/buntut-ott-di-kalsel-mencuat-petisi-ganti-nama-jalan-dan-gedung-bernama-paman-birin/>
- Ramadani, T. (2021). *4 Peran Humas Pemerintah Sektor Energi*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/thoriqramadani/4-peran-humas-pemerintah-sektor-energi-1vQpPZ6V0ii/full>
- Ramdhani, G. (2024). *Pemprov Kalsel Dorong Perangkat Kehumasan Mengelola Isu untuk Tingkatkan Citra dan Kepercayaan Publik*. Liputan6.Com.
- Ridwan, T., & Thohir, L. (2024). *Gubernur Kalsel muncul ke publik usai “hilang” setelah OTT KPK*. Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/4457241/gubernur-kalsel-muncul-ke-publik-usai-hilang-setelah-ott-kpk>
- Rini, K. S., Rusmiwari, S., & Widodo, H. P. (2017). Peran Humas Dalam Meningkatkan Citra Universitas Tribhuwana Tunggaladewi. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 34–37. www.publikasi.unitri.ac.id
- Rosmala. (2018). Strategi Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Dalam Memberikan Informasi Kepada Masyarakat. *Ensiklopedia Of Jurnal*, 3(2), 91–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.53>
- Rosmala, Mairita, D., & Dewi, S. A. E. (2024). Fungsi Government Public Relations Badan Pengusahaan. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Sosial Dan Informasi*, 9(2), 446–462. <https://doi.org/https://doi.org/10.52423/jikuho.v9i2.211>
- Rosmala, & Thoyyibah, I. (2023). Analisis pelanggaran kode etik humas polri (studi kasus ferdy sambo). *Jurnal Imliah Ilmu Komunikasi Comminique*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.62144/jikq.v5i2.140>
- Sani, A., Hidayat, M., & Sjafirah, N. A. (2020). Pemahaman petugas kehumasan Kementerian Dalam Negeri tentang peran Humas Pemerintah. *PROfesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 4(2), 215. <https://doi.org/10.24198/prh.v4i2.23528>
- Santoso, R. (2019). *Public relation : suatu pengantar*. Graha Ilmu.
- Sari, H. P., & Prabowo, D. (2024). *Kronologi OTT Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan di Kalimantan Selatan*. Nasional.Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/08/20122761/kronologi-ott-dugaan-korupsi-proyek-pembangunan-di-kalimantan-selatan?page=all>
- Sari, H. P., & Ramadhan, A. (2024). *Gubernur Jadi Tersangka, Survei Integritas di Kalsel Turun 2 Tahun Terakhir*. Kompas.Com.

- <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/09/15544501/gubernur-jadi-tersangka-survei-integritas-di-kalsel-turun-2-tahun-terakhir>
- Satria, R., & Widodo, H. P. (2017). Strategi Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam Meningkatkan Citra Kabupaten. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 8–14. www.publikasi.unitri.ac.id
- Shafarina, P. I. (2023). *Inilah Perjalanan Kasus Korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe hingga Ditangkap KPK*. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/hukum/inilah-perjalanan-kasus-korupsi-gubernur-papua-lukas-enembe-hingga-ditangkap-kpk-230508>
- Siswanto, B. D. L., & Abraham, F. Z. (2016). Peran Humas Pemerintah Sebagai Fasilitator Komunikasi Pada Biro Humas Pemprov Kalimantan Selatan. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 19(1), 55–68. <https://doi.org/10.20422/jpk.v19i1.64>
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Alfabeta.
- Suryanti, F. I., & Aranda, K. (2024). Strategi Public Relations dalam Pemulihan Reputasi Sec Bowl Pasca Kontroversi. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(4), 2523–2530. <https://doi.org/https://doi.org/10.54082/jupin.960>
- Tempo.co. (2024). *Sahbirin Noor Mundur dari Jabatan Gubernur Kalimantan Selatan*. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/politik/sahbirin-noor-mundur-dari-jabatan-gubernur-kalimantan-selatan-1167608>
- Trisnawati, A., & Syarah, M. M. (2017). Strategi Humas Politeknik Negeri Jakarta Dalam Penerimaan Mahasiswa Baru. *Jurnal Komunikasi*, 3(September), 2579–3292.
- Ulumiyah, P. R., & Gati, R. A. (2024). Meningkatkan Keterbukaan Publik: Strategi Humas Pemerintahan Dalam Pelayanan Infomrasi Publik Pada Potral Website PPID Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, 6(1), 42–58. www.publikasi.unitri.ac.id
- Waluyo, D., & Djaffar, R. (2020). Tinjauan Peran Government Public Relations Era Revolusi Industri 4.0 untuk Bersikap Milenial. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 1(1), 11–20. <https://202.89.117.136/index.php/mkm/article/view/3243>
- Widodo, H. B., Fatonah, S., & Hendariningrum, R. (2013). Peran Humas Pemerintah Daerah dalam Kasus Penambangan Pasir Besi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(2), 142. <https://doi.org/10.31315/jik.v11i2.3796>
- Yasinta. (2024). *Gubernur Kalsel Pimpin Apel Pagi*. Diskominfomc.Kalselprov.Go.Id. <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/11/11/gubernur-kalsel-pimpin-apel-pagi/>
- Yati, D. D. (2021). *Humas Perlu Branding? Memangnya Penting?* Kumparan.Com. <https://kumparan.com/dian-didy/humas-perlu-branding-memangnya-penting-1vbUE2KAm8T>
- Yin, R. K. (2017). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. SAGE Publications.